

SKRIPSI

ANALISIS KOORDINASI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (STUDI KASUS TENTANG FUNGSI KOORDINASI CAMAT) DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



Oleh:

AHMAD RAIS
NIM : 10576002729

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

ANALISIS KOORDINASI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (STUDI KASUS TENTANG FUNGSI KOORDINASI CAMAT) DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

OLEH : AHMAD RAIS

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mrngetahui sejauh mana Kinerja Camat dalam hal melaksanakan Fungsi Koordinasi yang berada di wilayahnya, yang dalam hal ini apakah telah sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku sebatas fungsi Koordinasi Camat tersebut.

Adapun yang menjadi populasi dalam peneliian ini adalah, Camat, Kepala Desa / Lurah, dan Pegawai. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel sensus untuk Camat sedangkan untuk Lurah / Kepala Desa serta pegawai dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu dengan mengambil sebagian jumlah populasi. Dengan pertimbangan keterbatasan penulis dan susahny menemukan semua populasi untuk di temui.

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data, berikutnya data tersebut ditabulasikan dalam bentuk tabel yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, lalu disusun dan dihubungkan dengan teori – teori yang berhubungan dengan masalah Tugas Umum Pemerintahan dalam hal Fungsi Koordinasi Camat kemudian diambil suatu kesimpulan.

Sedangkan hasil penelitian dapat diketahui Analisis Tugas Umum Pemerintahan (Studi Tentang Fungsi Koordinasi Camat) Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dikategorikan cukup baik karena dari 30 responden maka yang menyatakan kurang baik ada sebanyak 16 orang atau 52 % serta yang menyatakan kurang baik ada sebanyak 15 orang atau 48 % maka sesuai dengan teknik prngukuran maka 52 % berada pada interval 50-100 % yang beraktegori baik.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Abstrak	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II : TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Koordinasi	8
B. Pemerintahan Kecamatan	18
C. Karakteristik Koordinasi	23
D. Koordinasi dan Komunikasi	26
E. Koordinasi Wewenang serta Tanggung Jawab	27
F. Perencanaan Pembangunan	32
G. Konsep Operasional	35
G. Variabel Penelitian	37

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	39
C. Teknik Penarikan Sampel	40
D. Jenis Dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisa Data	41

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kantor Camat Tanah Putih	42
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	43
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	49

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	55
B. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1).....	57
C. Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan.....	63
D. Koordinasi dan Komunikasi	65
E. Rekapitulasi Hasil Penelitian.....	68

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (Musanef, 1982 : 5).

Tugas Pemerintahan Umum dari Kecamatan adalah :

1. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan,
2. Pembangunan, dan
3. Pembinaan masyarakat di Kecamatan

Sedangkan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan adalah

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa antara tugas pemerintahan umum Kecamatan dengan tugas umum Pemerintahan terdapat saling keterkaitan antara satu sama lainnya, dan dalam pelaksanaannya juga diperlukan suatu koordinasi yang sangat baik yang berguna untuk kelancaran tugas pemerintahan umum maupun tugas umum pemerintahan tersebut.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya pemerintahan kecamatan selalu melakukan koordinasi dengan instansi maupun pihak terkait yang dalam pelaksanaannya saling mendukung antara satu sama lain yang mana kegiatan ini bertujuan sebagai perwujudan pembangunan dari arah Kecamatan tersebut, adapun kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ini terdiri dari : (Panduan Operasional Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) 1989 : 01).

1. Mengkoordinasikan yang bersifat secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mencapai daya dan hasil guna yang lebih besar melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan wilayah yang menyeluruh dan terpadu dengan pendekatan perencanaannya dari bawah dalam hal ini camat melakukan koordinasi dengan

pemerintahan desa maupun dengan seksi perekonomian dan pembangunan di Kecamatan.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan desa atau desa lainnya sebagai pusat pengembangan terpadu antara desa (PPAD) di pedesaan, dengan meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik di bidang pelayanan ekonomi sosial budaya, pemerintahan maupun ketertiban dan keamanan masyarakat, disini Camat melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan seksi pelayanan umum di kecamatan.
3. Mempercepat pencapaian desa swasembada yang mantap di seluruh wilayah kecamatan sebagai prakondisi untuk terciptanya landasan yang kuat bagi upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembangunan desa terpadu dilaksanakan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan pembangunan, di sini Camat melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dengan seksi perekonomian dan pembangunan
4. Meningkatkan keadaan dan kondisi yang lebih kondusif serta meningkatkan keamanan di desa, disini Camat melakukan koordinasi dengan Koramil dan Polsek dan Pemerintah Desa.

Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai beberapa buah desa / kelurahan yang masih memerlukan pelaksanaan koordinasi oleh camat dalam pelaksanaan pembangunannya maupun pelaksanaan pemerintahannya.

Dari tugas umum yang ada tersebut maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi salah satu tugas umum saja yaitu dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, hal ini disebabkan tugas umum dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan jarang dilakukan oleh camat yang disebabkan banyaknya tugas camat untuk mengkoordinasikan tugasnya tersebut, dalam melaksanakan koordinasi tersebut biasanya camat melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Koramil dan polsek hal ini dilakukan camat sebagai salah satu tugasnya guna menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan selain itu camat juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjalankan pembangunan di setiap desa yang ada di wilayah kerjanya.

Dilihat dari pentingnya mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang harus dilakukan oleh camat dalam pelaksanaan tugas umumnya, dimana pemerintah kecamatan selaku aparatur adalah menjadi pusat dari pengkoordinasian, perencanaan dan pengendalian program dari koordinasi yang terpadu, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan (Studi Kasus Tentang Fungsi Koordinasi Camat) Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Perumusan Masalah.

Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dalam penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di kecamatan dikarenakan pentingnya pelaksanaan koordinasi pembangunan desa untuk menunjang pembangunan nasional serta adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir selaku koordinator dalam pembangunan di daerah wilayahnya, maka perumusan permasalahan yang penulis ajukan di dalam penulisan penelitian ini, adalah **Bagaimanakah Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan (Studi Kasus Tentang Fungsi Koordinasi Camat) Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tugas umum pemerintahan di kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk Menganalisis pelaksanaan koordinasi Camat di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan koordinasi camat dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan tanah putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai bahan informasi bagi camat untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pengkoordinasian pembangunan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama di masa mendatang.
- c) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan Latar belakang Masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Isi dari bab ini terdiri dari kerangka Teori, definisi konsep, variabel penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Isi dari bab ini terdiri dari Tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Isi dari bab ini adalah gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Isi dari bab ini adalah membahas hasil penelitian tentang analisis koordinasi tugas umum pemerintahan (studi kasus tentang fungsi koordinasi camat) di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.

BAB VI : Penutup

Isi dari bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa baik lagi kedepan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Koordinasi.

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur unsur dinas. Berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. (Musanef, 1982 : 8).

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Megeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi Kecamatan pasal 2 Menetapkan bahwa :

1. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah kecamatan yang meliputi beberapa kecamatan / kelurahan.
2. Pemerintah wilayah kecamatan adalah camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Kecamatan

Selanjutnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dipropinsi Riau, maka menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau no 109/III/1994 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan kecamatan bahwa :

“Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, pembagunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Vertikal”.

Tetapi dikarenakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan program pembangunan nasional sering kali menjadi masalah pelik bagi pemerintah, maka salah satu kendala yang sering menghambat tugas dari camat dalam wilayah kecamatan di daerah propinsi riau umumnya adalah masalah penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan-kegiatan vertikal, antara Instansi Vertikal dengan dinas daerah dan antara Instansi Vertikal lainnya dalam masing-masing wilayah.

Dalam pasal 3 dan pasal 4 keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan kembali ditegaskan bahwa camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Dengan demikian tugasnya adalah:

1. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan
2. Pembangunan, dan
3. Pembinaan masyarakat di kecamatan.

Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa camat selaku kepala pemerintahan di kecamatan dalam tugas kesehariannya juga memberikan pelayanan pada masyarakat yang akan melakukan segala urusannya, selain itu dalam hal ini pembangunan, camat selaku kordinator dalam penggerakan dan pelaksana pembangunan di wilayahnya yang bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kesuksesan pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan, sedangkan dalam hal pembinaan masyarakat camat dalam hal ini bertindak selaku Pembina yang

mengayomi dan memberi bimbingan pada masyarakat tentang segala kegiatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kemudian berdasarkan pasal 9 keputusan menteri dalam negeri Nomor 158 Tahun 2004, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya camat melakukan koordinasi terhadap instansi vertikal yang terdiri dari koramil, polsek, dan instansi otonom di kecamatan.

Menurut Panduan Operasional Sistem, Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP 1987 : 01) adalah :

“Suatu system perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan tindak lanjut, pelaksanaan pembangunan desa dan antar desa yang menyeluruh dan terpadu pada tingkat kecamatan”.

Dalam panduan operasional system tersebut dalam Unit Daerah Kerja pembangunan (UDKP) ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perencanaan pembangunan
- b. Adanya pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
- c. Adanya evaluasi pembangunan
- d. Adanya tindak lanjut pembangunan

Dengan melihat pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka peranan Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan sangat penting khususnya di kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Disamping itu kiranya dapat juga dilihat di sini dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dalam bab III mengenai pembentukan dan susunan daerah

Pasal 4 berbunyi :

1. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kecamatan dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
2. Daerah-daerah sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain.

Pasal 5 berbunyi :

1. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
2. Pembentukan, nama, batas dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

Agar pelaksanaan tiap kegiatan lebih terarah dan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, maka seharusnya setiap kegiatan tersebut harus direncanakan terlebih dahulu. Dari keterangan itu maka dapat diketahui bahwa perencanaan adalah suatu penentuan urutan tindakan biaya serta penggunaan waktu dan tenaga untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas data-data dengan memperhatikan skala prioritas yang wajar dan efisiensi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sehingga komponen-

komponen harus dipadukan secara tepat dan serasi agar terhindar dari timbulnya pemborosan yang meliputi tenaga, bahkan waktu dan biaya. (Kuswata 1985 : 102)

Sesuai dengan yang tercantum didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka dalam pasal 126 ayat (3) dikatakan bahwa Tugas Umum Pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

“Koordinasi adalah sesuatu yang mengandung pengertian semangat “bekerja sama” (corporation).semangat”bekerja sama”diantara sesama satuan organisasi atau instansi serta di antara sesama pejabat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,memang sangat penting artinya sebagai landasan keberhasilan usaha pembangunan itu. Tetapi, semangat berkerjasama itu saja, belum menjamin tujuan

akan tercapai. Semangat yang satu dan kompak itu, dalam wujud aktifitas nyata, masih harus diikuti dengan koordinasi (coordination)". (westra:1993;53).

Istilah koordinasi berasal dari kata "cum" (yang berarti berbeda-beda). dan "ordinare" yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusan. Memang jalaran utama mengapa koordinasai mutlak perlu dalam suatu organisasi atau usaha kerjasama ialah karena adanya perbedaan-perbedaan (satuan, pekerjaan orang atau pejabat, dan sebagainya) tersebut. Perbedaan-perbedaan itu dikarenakan keharusan untuk mengadakan pembagian tugas, pekerjaan spesialisasi dan tanggung jawab, sebagai konsekuensi berorganisasi atau berkerjasama. Itulah sebabnya, tanpa koordinasi ada tendensi atau kemungkinan masing-masing spesialisasikan akan berjalan sendiri-sendiri yang bisa juga menuju berbagai arah atau tidak pernah bertemu.

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama
3. Koordinasi adalah suatu proses yang terus menerus
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur
5. Konsep kesatuan tindakan
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (soewarno.1984:118)

Selanjutnya hakekat koordinasi menurut Soewarno (1984:118) adalah:

1. Koordinasi adalah akibat logis daripada adanya prinsip pembagian habis tugas dimana setiap satuan kerja hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
2. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsional dimana setiap satuan kerja hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
3. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik..
4. Adanya perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan memberi bantuan untuk mencapai koordinasi dan prosedur.
5. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan staf sub-sub organisasi suatu instansi.
6. Adanya pembagian dan hubungan kerja antara kelompok dalam bentuk kerjasama.
7. Adanya pertemuan melalui rapat antara kelompok-kelompok untuk membahas dan memecahkan yang dihadapi (Koontz dalam, Siagian 1978:42)

Koordinasi Menurut White dalam Syafiie (1998 : 41) adalah penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing-masing bagian, dan usaha untuk mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (*parts in time*), sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Koordinasi Menurut Fayol dalam Syafiie (1998 : 41-42) berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.

Terry dalam Syafiie (1998 : 42) menjelaskan bahwa koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari usaha-usaha (*efforts*) untuk

menciptakan pengaturan waktu (*trimming*) dan memimpin (*directing*), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonius*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*).

Salah satu hakikat koordinasi menurut Syamsi (1994 : 114) merupakan fungsi yang merembes ke fungsi-fungsi manajemen lainnya. ini berarti bahwa ada koordinasi dalam perencanaan, koordinasi dalam pengorganisasian, koordinasi dalam pengendalian.

Untuk melaksanakan koordinasi diperlukan syarat – syarat yang menurut Syamsi (1994 : 116) meliputi :

1. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalal organisasi
2. Adanya suasana persaudaraan dan semangat kerjasama yang besar dalam organisasi
3. Adanya kontak – kontak dan komunikasi yang cukup diantara orang-orang dalam organisasi
4. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian.

Handyaningrat (1991 : 117) berpendapat, koordinasi dimaksud sebagai usaha menyatukan kegiatan – kegiatan dan satuan – satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk tujuannya.

Handoko (1984 : 195) menguraikan makna koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah

(departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Handoko (1984 : 199) merinci tentang mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar sebagai berikut :

1. Hirarki manajerial. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja. Wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas serta dilaksanakan dengan pengarahannya yang tepat.
2. Aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
3. Rencana dan penetapan tujuan, pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahannya seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama, ini perlu bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasi setiap satuan organisasi.

Handayani (1985 : 88) menyatakan bahwa koordinasi adalah tanggung jawab pimpinan sebagaimana yang dikatakannya bahwa: "koordinasi adalah konsep dasar kedua di samping kepemimpinan. Sebab koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. karena keduanya saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator".

Sementara itu Farland dalam Handayani (1985: 89) menguraikan definisi tentang koordinasi sebagai suatu proses dimana pimpinan mengembangkan

pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. berdasarkan definisi tersebut maka koordinasi menurut Farland mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

1. Bahwa tanggung jawab daripada koordinasi terletak pada pimpinan. oleh karena itu koordinasi merupakan tugas daripada pimpinan. Koordinasi sering dicampuradukan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti berbeda. sekalipun demikian, pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. oleh karena itu maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan daripada koordinasi, jelasnya koordinasi beda dengan koperasi.
2. Adanya Proses, sebab koordinasi adalah pekerjaan daripada pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Pengaturan secara teratur terhadap usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah daripada individu yang bekerjasama, dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
4. konsep kesatuan tindakan yang merupakan inti daripada koordinasi, atau kesatuan daripada usaha. artinya bahwa pimpinan harus mengatur

sedemikian rupa usaha-usaha daripada setiap individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil

5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, dimana tuntutan kerjasama antar individu sebagai suatu usaha kelompok sangat ditekankan demi tercapainya tujuan bersama.

Arti penting koordinasi menurut Handaningrat (1985 : 93) adalah koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi tersebut. Oleh karenanya, koordinasi memberikan sumbangan guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu dilakukan secara spesialis dan menghemat waktu, materi maupun tenaga.

B. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Syafiie,2001:20)..

Selanjutnya Atmosudirdjo (1986:14) memberikan pengertian pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan politik untuk dan atas nama negara. Dengan demikian pemerintahan merupakan alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan dan merupakan alat, dan juga dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Kansil, 1994:38).

Secara lebih rinci, Surianingrat (1992:9), menyebutkan kata pemerintahan berasal dari suku kata perintah, yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam kata perintah tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas yaitu:

- a. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
- b. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah.
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah menunjukkan kegiatan, proses, kontrol, negara dan orang-orang yang ditugaskan menyelenggarakan pemerintahan maupun cara, metode atau sistem dalam mengatur masyarakat.

Menurut Syafiie (2001:20) pemerintahan dapat diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Secara lebih rinci disebutkan pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara atau tujuan nasional. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Selanjutnya Salam (2004:36), menjelaskan tentang pemerintahan yaitu upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan, pengaturan,

pengamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat, penduduk dan seluruh rakyat dalam segala kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan kamtibmas.

Tugas pemerintah adalah untuk mencapai tujuan negara. Secara umum tugas pemerintah dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu, tugas memerintah dan tugas eksekutif, Atmosudirdjo(dalam Salam, 2004:39).

Menurut Syafiie (2001:39) ruang lingkup ilmu pemerintahan dibidang ketatalaksanaan, yaitu :

- a. Administrasi Pemerintahan Pusat
- b. Administrasi Pemerintahan Daerah
- c. Administrasi Pemerintahan Kecamatan
- d. Administrasi Pemerintahan Kelurahan
- e. Administrasi Pemerintahan Desa
- f. Administrasi Lembaga Tingkat departemen
- g. Administrasi Lembaga Non Departemen

Menurut Syafiie (2001:41) ada 6 azas pemerintahan untuk dapat tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu :

- a. *Azas aktif*, yaitu pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif dalam mengurus seluruh pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, jadi pemerintah selalu aktif dimanapun berada.
- b. *Azas Vrij Bestuur* (kekosongan pemerintahan), yaitu apabila terjadi ketidak hadiran jajaran (Pegawai) maka jajaran yang lain dapat mengisi kekosongan tersebut.

- c. *Azas freies Ermessen*, yaitu pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Azas Historis*, yaitu Azas dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk mengulangnya pemerintah berpedoman kepada peristiwa yang lalu, yang sudah pernah terjadi.
- e. *Azas etis*, yaitu Azas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan pada kaidah norma.
- f. *Azas Otomatis*, yaitu Azas dengan sendirinya, misalnya kepanitiaan Hari-hari besar Nasional, dan lain-lain

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain daripada itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kabupaten/Perkotaan perlu dibentuknya kecamatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan. Sebagai wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dipegang oleh Camat. Camat sebagai kepala wilayah adalah wakil pemerintah dan

sebagai penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang, terkecuali dalam bidang pertahanan keamanan, peradilan dan luar negeri, serta dalam bidang moneter dalam arti mencetak uang.

Sebagai penguasa tunggal adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan. Sebagai pemerintah maka kepala wilayah adalah pejabat tertinggi di wilayahnya dibidang pemerintahan, terlepas dari persoalan pangkat,

Sedangkan menurut pasal 1 huruf m, undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, “Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota”. Dengan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan. Dengan demikian Camat bukan lagi kepala wilayah yang memiliki kewenangan sebagai “penguasa wilayah”. Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, artinya kedudukan Camat di Kecamatan tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya yang ada di Kecamatan seperti Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dengan demikian Camat tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum yang meliputi pengawasan, koordinasi serta kewenangan residu

Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati atau Walikota kepada Camat, maka pemerintah Kabupaten atau Kota perlu memerikasi tugas yang dilimpahkan secara proporsional. Pelaksanaan tugas Camat akan terlaksana dengan secara optimal

apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Camat, dibantu oleh Lurah dan lembaga kemasyarakatan seperti, Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kecamatan. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan dan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan Pemerintahan Kecamatan adalah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan.

C. Karakteristik Koordinasi.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya maksimal, agar dapat diperoleh hasil secara keseluruhan. (Sufian,1995:261).

1. Ciri –Ciri Koordinasi

Mooney dan Reily mendefenisikan koordinasi (dalam Sufian:1995:261) “*Coordination as the achievement*” (koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan

Mc. Farland mendefenisikan koordinasi sebagai berikut : *“Coordination is the process where by an executive develop orderly patterns of group efforts among his subordinates and secure unity of actions the pursuit of command purpose”*.

(Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. (dalam Sufian:1995:261).

Berdasarkan atas defenisi Mc. Farland, maka koordinasi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut (Dalam Sufian:1995:262) :

1. Bahwa tanggung jawab daripada koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Koordinasi sering dicampur adukan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda.
2. Adanya proses (Continues process), sebab koordinasi adalah pekerjaan daripada pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Pengaturan secara teratur daripada usaha yang kelompok oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah para individu bekerja sama dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efesiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti daripada koordinasi. Kesatuan daripada usaha, berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha daripada kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.
5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan daripada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok, dimana mereka bekerja.

Koordinasi terdiri dari 2 Jenis, menurut Sufian (1995:263)

1. Koordinasi Intern

Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasannya langsung. Dalam koordinasi ini kepala/manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan bawahannya telah melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijaksanaan atau tugas pokoknya.

2. Koordinasi Fungsional

Yaitu koordinasi yang dilakukan secara horizontal. Hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi yang lain.

Koordinasi dalam organisasi adalah, menurut Sufian (1995:265)

1. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu. Karena itu maka koordinasi adalah memberikan sumbangan guna tercapainya efisiensi terhadap usaha yang lebih khusus.

2. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan. Jika kepemimpinannya kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik.
3. Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personel didalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi itu harus selalu ada.

2. Koordinasi dan Manajemen.

Selanjutnya Sufian juga mengatakan koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi/manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi ialah konsep dasar kedua di samping kepemimpinan, sebab koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bias dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi

3. Koordinasi dan Komunikasi.

Didalam pelaksanaan koordinasi ini maka untuk itu perlu pula terlebih dahulu disini disajikan apa itu komunikasi.

Menurut Willington (1998:109) proses komunikasi itu dimulai dalam sebuah perusahaan ketika dilakukan fase pengenalan. Pembentukan sikap dari seseorang karyawan ketika pertama kali diperkenalkan pada misi, buday, strategi, proses produk orang dan tim pendukung.

Menurut Siagian (1998:115) penetapan suatu rencana amat penting untuk dikomunikasikan kepada berbagai pihak, pada tahap investigasi. Dalam bentuk survey, studi kelayakan, wawancara, komunikasi dengan pihak yang diharapkan akan memberikan data. Informasi dan pemikirannya mutlak perlu dipelihara dengan baik karena hanya dengan demikianlah apa yang dicari diperoleh dengan baik.

Selanjutnya Siagian (1998:119) juga menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi yang efektif hanya akan mengakibatkan timbulnya salah pengertian dan antipati yang apabila dibiarkan berkembang terus akan mempunyai pengaruh yang sangat negative terhadap kehidupan organisasi

Koordinasi dan komunikasi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Koordinasi adalah hasil akhir dari pada komunikasi. Sejumlah daripada unit, dimana seseorang dapat mengkoordinasikan berdasarkan rentang jenjang pengendaliannya (*Span of Control*). Sebagian besar ditentukan oleh kemampuan atas berkomunikasi dengan mereka. (Sufian, 1995:261)

4. Koordinasi dan Wewenang Serta Tanggung Jawab.

Struktur wewenang organisasi mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas organisasi, pemilihan informasi berarti bahwa individu-individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan mereka.

Dalam melaksanakan kegiatan dan hubungan kerja yang baik diperlukan pembinaan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi banyak kesalahan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (Toha:1989:7).

Dari pendapat yang dikemukakan diatas maka ada dua hal yang perlu dijadikan tolak ukur yakni adanya penyerahan tugas yang dianggap kurang penting secara organisasional keduanya adanya kepercayaan terhadap orang-orang (pegawai) yang dipercaya, ada pula wewenang yang diserahkan dan tanggung jawab dari bawahannya yang diserahkan wewenang.

Menurut Handoko (1989:224) delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pendelegasian wewenang adalah proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Empat kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan :

1. Pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahannya
2. Pendelegasian wewenang melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
3. Penerima delegasi baik implicit maupun eksplisit menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab.
4. Pendelegasian wewenang menerima pertanggungjawaban pegawai untuk hasil-hasil yang dicapai.

Jadi maksud Manullang (1981:112) diatas jelas sama dengan yang diungkapkan Nitisemito sebelumnya, bahwa persyaratan utama yang harus ada, sebelum pelimpahan wewenang itu dilaksanakan antara lain perasaan senang dalam menerima pendelegasian wewenang dari atasan oleh pegawai harus baik. Otoritas

Camat yang diberikan harus juga dijaga pegawai yang bersangkutan serta tanggung jawab mesti diutamakan ketika pekerjaan yang dilimpahkan atasan tersebut telah dilaksanakan. Selengkapnya kita bandingkan pula dengan penjelasan yang diungkapkan Manullang berikut ini. (Manullang : 1981 : 112).

“Memberikan pertanggungjawaban berarti memberi laporan bagaimana melaksanakan tugas-tugas dan bagaimana ia memakai wewenang yang diberikan kepadanya jadi pertanggungjawaban adalah memberikan laporan bagaimana tugas-tugas dilaksanakan dan cara bagaimana kekuasaan dipakai”.

Dari ketiga unsur diatas, jelaslah bahwa kekuasaan dan tugas dapat di delegasikan sedangkan pertanggungjawaban tidak dapat di delegasikan. Dengan perkataan lain seseorang Camat yang mendelegasikan tugas dan kekuasaan kepada bawahannya tidak berarti mendelegasikan pertanggungjawabannya, melainkan ia tetap bertanggung jawab akan pelaksanaan tugasnya sebaik-baiknya (Manullang : 1981 : 113)

Penjelasan diatas berarti bahwa pegawai yang menerima pelimpahan tugas dari atasannya bukan berarti tanggung jawab dalam kepastiannya dalam memikul tugas yang didelegasikan itu, melainkan hanya sebatas tanggung jawab bagaimana melaksanakan kepercayaan tugas yang diserahkan kepadanya. Tanggung jawab tugas Camat tetap berada ditangan Camat itu sendiri, tetapi sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan amanat Camat atas penyerahan kepercayaan itu haruslah dimiliki oleh pegawai yang dimaksud.

Menurut Sriyono (1994:65) ada beberapa macam wewenang antara lain :

1. Wewenang perencanaan yaitu wewenang untuk menyusun perencanaan terhadap apa, dimana, mengapa, kapan dan bagaimana suatu kegiatan dilakukan serta siapa pelaksananya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
2. Wewenang pengorganisasian yaitu wewenang untuk mengatur maupun membagi-bagi pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Wewenang pemotivasian yaitu wewenang untuk menggerakkan pegawai dengan memberi motivasi-motivasi.
4. Wewenang pengawasan yaitu wewenang untuk melakukan pengendalian dan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi sehingga diperoleh hasil sesuai dengan rencananya.
5. Wewenang kepegawaian yaitu wewenang untuk mengadakan, menepatkan serta membina para pegawai dalam organisasi.
6. Wewenang financial harta keuangan yaitu wewenang untuk mengatur dan memanfaatkan serta mempertanggung jawabkan keuangan yang digunakan untuk pembiayaan organisasi.
7. Wewenang material yaitu wewenang untuk mengadakan, mengatur, dan menggunakan secara efektif untuk proses kerja dalam organisasi.

Menurut Sutarto (1994:141) beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pelimpahan wewenang antara lain :

1. Batas wewenang
2. Tanggung jawab
3. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab
4. Kemauan memperhatikan pendapat dari pejabat yang menerima limpahan
5. Mempercayai pejabat yang disertai wewenang
6. Pengontrolan

Pelimpahan wewenang dilimpahkan bila seorang atasan memberikan kewenangan kepada seorang pegawai untuk mengambil keputusan. Proses pelimpahan tersebut biasanya meliputi (koontz : 1989:338)

1. Menentukan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kedudukan (position)
2. Menetapkan tugas untuk kedudukan itu
3. Melimpahkan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
4. Memegang orang dalam kedudukan itu bertanggung jawab bagi terlaksananya tugas-tugas tersebut.

Selanjutnya dalam pembagian kerja ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki perincian aktivitas yang jelas.
2. Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan karyawan yang paling rendah harus memiliki perincian tugas yang jelas dalam suatu daftar perincian tugas.
3. Jumlah tugas yang sebaiknya dibebankan kepada seorang karyawan harus beraneka ragam sehingga ia tidak jemu dengan satu pekerjaan
4. Variasi yang dilakukan diharapkan yang sejenis atau erat hubungannya antara satu sama lainnya.
5. Beban aktivitas yang diberikan kepada masing-masing karyawan hendaknya merata.
6. Penempatan karyawan yang tepat pada tempatnya.
7. Penambahan/pengurangan karyawan hendaknya berdasarkan volume kerja.

8. Jangan sampai terjadi pengotakan pejabat yaitu : pembagian kerja yang harus diberikan kepada pejabat/karyawan tertentu. (Suranto, 1992 : 94)

Selanjutnya dalam organisasi rapat bagi seseorang pimpinan adalah karena berguna untuk mengetahui atau melihat berbagai cara yang nampaknya terbaik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi.

Rapat pimpinan adalah sangat penting untuk memperoleh keyakinan terhadap alternative yang merupakan cara terbaik untuk mendapat hasil yang diharapkan.

Jadi dengan demikian, selama rapat dilakukan harus terdapat suatu mekanisme yang memungkinkan terjadinya umpan balik tentang hasil yang diperoleh maupun masalah-masalah operasional yang dihadapi dan tindaklanjut yang perlu diambil, Siagian (1988 : 40)

C. Perencanaan Pembangunan

Menurut Winardi (1990 :139) perencanaan adalah karya mental serta intelektual yang diperlukan sebelum upaya dan aktifitas fiskal dilaksanakan. Perencana memungkinkan para menejer (pimpinan)mempersatukan sumber-sumber daya secara efektif dalam rangka usaha mencapai sasaran.Selanjutnya juga merupakan sebuah fungsi manajemen yang fundamental secara primer. Para pimpinan perlu menyelenggarakan perencanaan secara cermat sebelum mereka dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi pengorganisasian.mengaktualisasi dan mengawasi secara rasional.

Meskipun suatu perencanaan disusun untuk mencapai tujuan namun suatu rencana hendaknya juga membawa manfaat.Maksudnya hasil rencana diperoleh

sesuai atau setidaknya mampu memberikan batasan keinginan yang di rumuskan dalam rencana.

Kemudian pencapaiannya diharapkan melalui pelaksanaan yang efisien dan efektif, serta berdaya guna kepada pembuatnya ataupun kepada organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang dibuat haruslah memperhatikan factor perumusan rencana. Teknis pendataan dan sifat atau nilai rencana.

Perumusan rencana sangat penting peranannya bagi kesuksesan pencapaian hasil. Atmosudirdjo (1982 : 193) menyatakan perumusan tujuan ataupun objektivitas perencanaan harus berdasarkan kepada lima unsur yaitu :

1. Tujuan / finish
2. Ruang lingkup / skope
3. Perincian dari apa yang hendak dicapai spesifikasi
4. Kriteria standart / norma yang harus diperhatikan
5. Maksud / arah serta kaitannya dengan objektivitas lainnya.

Supaya pelaksanaan pencapaian tujuan berlangsung maksimal maka masalah teknis pendataan perlu pula mendapat perhatian pihak perencanaan. yakni:

1. Persepsi yang jelas tentang masa mendatang
2. Perhitungan yang matang mengenai keadaan yang akan dihadapi dengan kemungkinan menanggung resiko.
3. Visualisasi sebagai factor ketidakpastian beserta dampak negative yang mungkin timbul.
4. Peramalan tentang situasi pergerakan organisasi.
5. Petunjuk-petunjuk yang jelas mengenai langkah pelaksanaan rencana didalam bentuk program kerja yang benar-benar mantap. (Siagian, 1986:122).

Selanjutnya Siagian (1986:123) juga menyatakan syarat-syarat perencanaan yang baik yaitu :

1. Perumusan tujuan yang rasional
2. Sistematisa penyusunan berdasarkan teknis-teknis perencanaan yang dimiliki oleh perencanaan perhitungan analisis dan visualisasi dari data, fakta informasi maupun berbagai petunjuk yang akurat.
3. Bersifat sederhana, luwes dan pragmatis.
4. Berbentuk peramalan
5. Tata cara pelaksanaan yang konseptual, terinci serta konsisten dengan tetap memperhatikan masalah dan variable lain yang penting dalam memperlancar pelaksanaannya.
6. Koordinasi dengan fungsi manajemen lainnya.

“Konsep pembangunan berkaitan dengan konsep system sosial. Perubahan sosial,dan perubahan sistem sosial.sistem sosial adalah sistem peranan-peranan yang diabstraksikan dari organisasi-organisasi yang nyata dalam masyarakat.perubahan sosial adalah proses,dengan mana perubahan dalam struktur dan fungsi sistem sosial terjadi.pembangunan adalah semacam bentuk perubahan sosial,yaitu perubahan sosial yang dikendalikan”.(ndrha. 1988 :10-11)

Berdasarkan adanya perubahan sosial yang dikendalikan itu berarti diharapkan tidak hanya mencapai tingkat kelompok melainkan juga mencapai tingkat anggota masyarakat.Dengan demikian juga diharapkan tiap anggota masarakat dapat mengalami perubahan yang mendasar dari cara hidup tradisional ke tingkat hidup yang teknologis dengan mental lebih maju,yang disebut modernisasi.

“Pembangunan adalah merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu yang terus menerus dari suatu keadaan tertentu ke suatu keadaan yang lebih baik, pembangunan meliputi segala sesuatu dari segi Politik Ekonomi, Sosial Budaya itu akan berhasil apabila dia merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat dalam suatu Negara”, (Tjokroamidjojo, 1986 :222)

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa arah tujuan pembangunan itu adalah merupakan pencerminan kepentingan kehidupan masyarakat dan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan.

“Bahwasahnya penyusunan rencana pembangunan dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah. Dari prinsip ini aspirasi rakyat dan kebutuhannya dapat di tampung bukan saja sebagai objek pembangan, tetapi yang terpenting dalam mendewasakan masyarakat adalah mendudukannya sebagai subjek pembangunan yang di laksanakan adalah dari rakyat oleh rakyat dan rakyat (Suwingjo, 1986:35)

Adapun pembangunan yang di maksudkan disini adalah pembangunan yang berupa pembangunan fisik dan non fisik. pembangunan fisik misalnya adanya seperti pembangunan jalan desa dan kecamatan, gedung pelayanan masyarakat (puskesmas, sekolah dan balai desa). pengairan dan irigasi. Sedangkan Pembangunan non fisik adalah seperti pembangunan mental seperti ceramah atau penyuluhan pertanian dan kesehatan yang di sampaikan kepada masyarakat.

Dalam ajaran Islam yang mendefenisikan pembangunan sebagai keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Adh-Dhuha ayat 4, sebagai berikut :

وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى ۖ

Artinya : Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan) [1582].

[1582]. Maksudnya ialah bahwa akhir perjuangan Nabi Muhammad S.A.W. itu akan menjumpai kemenangan – kemenangan, sedang permulaannya penuh dengan kesulitan – kesulitan. Adapula sebagian ahli tafsir yang menagrtikan *Akhirat* dengan *Kehidupan Akhirat* beserta dengan segala kesenangannya dan *Ula* dengan arti *Kehidupan Dunia*.

D. Konsep Operasional.

Menurut Sofyan Efendi, konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu (Singarimbun, 1989:34).

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Defenisi operasional merupakan operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut. Indikator dari penelitian ini adalah :

Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Tugas Umum Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh camat terhadap, pemberdayaan masyarakat, ketenttaman dan ketertiban umum, kegiatan pemerintahan baik di kecamatan maupun di desa serta

melakukan koordinasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 yaitu :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Koordinasi camat dengan pegawai kecamatan yaitu adanya pembagian tugas dan koordinasi camat dengan pegawai kecamatan wewenang yang dilakukan camat pada pegawainya di kecamatan tanah putih, terdiri dari :
- a. Adanya pembagian tugas dan hubungan kerja yang jelas, yang dalam hal ini pembagian tugas guna pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
 - b. Adanya wewenang
 - c. Adanya tanggung jawab

B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti adalah :

1. Koordinasi Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
2. Adanya Perencanaan Pembangunan.
3. Adanya Komunikasi dan Pertemuan

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk dapat memperoleh data yang dianggap relevan dengan penelitian ini digunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut :

A. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat.

Mengacu kepada rumusan penelitian tergambar bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui survey dijadikan dasar untuk mendiskripsikan setiap Variabel. Oleh karena itu tipe penelitian ini dapat dimasukkan dalam klasifikasi tipe “Survey Diskriptif”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian (Arikunto, 2002:108). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah fungsi koordinasi camat di kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Oleh karena itu sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri.

Populasi merupakan keseluruhan dari sumber-sumber data yang ada, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi data sebenarnya. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak orang yaitu seluruh pegawai kantor camat Tanah Putih, dengan rincian

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Pegawai	Populasi	Sampel
1	Camat	1	1	100%
2	Sekcam	1	1	100%
3	Lurah/Kepala Desa	10	10	100%
4	Kasi Pemerintahan	4	4	100%
5	Kasi Pelayanan Umum	5	5	100%
6	Kasi PMD	4	4	100%
7	Kasi TIB	3	3	100%
8	Kasi Kesos	2	2	100%
	Jumlah	30	30	100%

Sumber : Kantor Camat Tanah Putih 2008

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel sensus untuk camat sedangkan sedangkan untuk Lurah/ desa serta pegawai dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu mengambil sebagian jumlah, populasi. Dengan pertimbangan keterbatasan penulis dan susahny menemukan semua populasi untuk ditemui.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. (Sugiono, 2005:91).

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah : data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian dilokasi penelitian (lapangan) melalui penyebaran kuisioner (membuat daftar pertanyaan), dokumen dan observasi.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti laporan-laporan, literature-literatur, dan lampiran data-data yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskna masalah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

- a. Teknik pengumpulan data primer, yang diperoleh melalui :

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada informan. Dalam hal ini pihak aparat kecamatan (Camat) dijadikan responden dalam wawancara.
 2. Angket (kuesioner), yaitu pengumpulan data dengan menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden. Dalam hal ini angket disebarkan kepada Lurah dan seluruh pegawai camat.
 3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian serta mencatatnya kedalam catatan penelitian.
- b. Pengumpulan data Sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

G. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data, berikutnya data tersebut ditabulasikan dalam bentuk tabel yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif .

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dibentuk sejak tahun 1976 waktu itu ibukota kabupaten masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, sejak adanya pemekaran wilayah yang mana sesuai dengan Undang-Undang No.53 tahun 1999 Kecamatan Tanah Putih bergabung ke Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Tanah Putih memiliki 2 kelurahan dan 8 Desa, memiliki 35 dusun, 72 RW, dan 176 RT.

1. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangko
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Sintong
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Kopar

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Tanah Putih seluas $\pm 1961,87 \text{ Km}^2$ dan terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa sebagai berikut :

- a. Kelurahan Sedinginan
- b. Kelurahan Banjar XII
- c. Desa Sekeladi

- d. Desa Teluk Mega
- e. Desa Putat
- f. Desa Rantau Bais
- g. Desa Ujung Tanjung
- h. Desa Sintong
- i. Desa Teluk Berembun
- j. Desa Mumugo

3. Keadaan Wilayah

Keadaan permukaan tanah atau topografis Wilayah kecamatan Tanah Putih pada umumnya terdiri dari 32 m dpl dari permukaan laut dan memiliki suhu maksimum 34 °C dan suhu minimum 25 °C.

B. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan suatu factor yang dominant dalam pembangunan suatu wilayah, hal ini tergantung pada sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Dengan baiknya kualitas sumber daya manusia maka pembangunan akan lebih maksimal. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tanah Putih dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Menurut umur dan Jenis Kelamin

Gambaran umum tentang kependudukan Kecamatan Tanah Putih sampai dengan bulan Oktober 2008, maka dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan

Tanah Putih adalah sebanyak 47.679 jiwa dengan perincian laki-laki sebesar 24.440 jiwa dan perempuan 23.239 jiwa (Sumber data tersebut di peroleh dari Kecamatan Tanah Putih). Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada table berikut ini

Table IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

No	Kelompok	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-6	3908	2093	6.001
2	7-12	2700	4910	7610
3	13-18	1282	2476	3758
4	19- ke atas	16550	13760	30310
Jumlah		24440	23239	47679

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tanah Putih 2008

Dari table di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa keadaan penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kecamatan Tanah Putih sebagai berikut :

Penduduk yang berumur 0-4 tahun penduduk laki-laki yang berjumlah 3908 orang, sedangkan perempuan berjumlah 2093 orang. Penduduk yang berumur 7-12 tahun penduduk laki-laki berjumlah 2700 orang, sedangkan perempuan berjumlah 4910 orang. Penduduk yang berumur 13-18 tahun penduduk laki-laki berjumlah 1282 orang, sedangkan perempuan berjumlah 2476 orang. Penduduk yang berumur 19 tahun ke atas penduduk laki-laki berjumlah 16550 orang, sedangkan perempuan berjumlah 13760 orang.

2. Keadaan Penduduk Menurut Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan amat berguna di galakan oleh Pemerintah baik negeri maupun swasta, baik formal maupun non formal. Masyarakat akan bisa cerdas dan menjadi maju untuk kehidupan Bangsa dan Negara, maka dari itu masyarakat sangat memerlukan pendidikan, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan sangat mutlak diperlukan hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam halaman pertama pembukaan, dengan jelas menyatakan “Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya”.

Masalah Pendidikan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terlihat cukup hal ini terbukti banyaknya jumlah penduduk yang tingkat pendidikan bertamatan Sekolah Menengah Umum, namun masih banyak juga penduduk Kecamatan Tanah Putih yang berpendidikan rendah. Karena pendidikan sangat penting diterapkan kepada masyarakat untuk dapat menjadi masyarakat yang handal dan berkualitas dalam berfikir dan berkeaktifitas yang baik. Dibawah ini dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Table IV.2 Sarana Pendidikan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	15	17,85 %
2	SD/MIS	43	51,19 %
3	SMP/MTs	17	20,23 %
4	SLTA/MA	9	10,71%

5	Perguruan Tinggi	-	-
Jumlah		84	100%

Sumber Data : Kecamatan Tanah Putih 2008

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pendidikan yang paling banyak dimiliki di Kecamatan Tanah Putih adalah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 43 SD dengan persentase 51,19 % yang terdiri dari SD Inpres, SD Swasta dan MDA.

Sarana pendidikan SMA sebanyak 9 buah dengan persentase 10,71 %. Sedangkan TK sebanyak 15 buah dengan persentase 17,85 % dan SMP sebanyak 17 buah dengan persentase 20,23 %. Sedangkan untuk perguruan tinggi di Kecamatan Tanah Putih belum memiliki perguruan tinggi.

3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian

Berusaha mencari rizki memenuhi kebutuhan hidupnya adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab tanpa bekerja manusia tidak akan mendapat apa yang ia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu berusaha dan bekerja bisa dikatakan sebagai suatu amal yang mulia.

Mata pencarian masyarakat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir beragam macam sesuai dengan cirri daerah perkotaan. Sebagaimana halnya masyarakat Kecamatan Tanah Putih ini mata pencarian yang dominant adalah dalam bidang ekonomi dan pertanian disamping mata pencarian lainnya. Hal ini dapat dilihat seperti buruh, tukang, pegawai negeri, nelayan, ternak, berdagang, pengusaha prekonomian lebih menonjol hal ini disebabkan letak yang sangat strategis dari Kecamatan itu sendiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Table IV.3 Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	14.213	56,63 %
2	Ternak	463	1,84 %
3	Buruh	997	3,97 %
4	Pegawai Negri Sipil	537	2,13 %
5	Nelayan	4.347	17,32 %
6	Wiraswasta	1.612	6,42 %
7	Dan lain-lain	2.927	11,66 %
Jumlah		25.096	100 %

Sumber Data : Kecamatan Tanah Putih 2008

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Tanah Putih adalah penduduk yang memiliki mata pencarian sebagai petani yaitu sebanyak 14.213 dengan persentase 56.63 % yang artinya separuh dari penduduk di Kecamatan Tanah Putih berprofesi sebagai petani. Dan yang memiliki mata pencarian paling sedikit adalah peternak yaitu hanya 463 dengan persentase 1.84 %. Kondisi ini mengakibatkan pihak Pemerintah Daerah Rokan Hilir memusatkan perhatian dibidang perdagangan dan perumahan serta pembangunan ruko. Hal ini dapat dilihat dari sepanjang ruas jalan Lintas Sumatera , dapat dijumpai berdirinya beberapa ruko dan kompleks perumahan di Kecamatan Tanah Putih yang pertumbuhan dan pengembangan berjalan dengan pesat.

4. Keadaan Penduduk Menurut Sarana Ibadah Umat Beragama

Sarana ibadah merupakan tempat dimana umat beragama menjalankan ritinitas untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Di Kecamatan Tanah Putih terdapat sarana ibadah setiap umat beragama, kecuali umat hindhu tidak ada sarana ibadahnya ini dikarenakan minimnya pemeluk agama hindhu di Kecamatan Tanah Putih. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel IV.4 Sarana Ibadah di Kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Mesjid/Mushola	119	97,55 %
2	Greja Khatolik	1	0,81 %
3	Greja Protestan	2	1,64 %
4	Vihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		122	100%

Sumber Data : Kecamatan Tanah Putih 2008

Dari table diatas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang paling banyak di Kecamatan Tanah Putih adalah sarana ibadah Umat Islam yaitu sebanyak 119 buah dengan persentase 97,55 % yang terdiri dari Masjid dan Mushola. Sarana Dan sarana ibadah umat Kristen Protestan sebanyak 2 buah dengan persentase 1,64 % dan sarana ibadah umat Kristen Khatolik sebanyak 1 buah dengan persentase 0,81 %.

Sedangkan sarana ibadah umat Hindhu tidak ada ini dikarenakan minimnya pemeluk agama Hindhu di Kecamatan Tanah Putih.

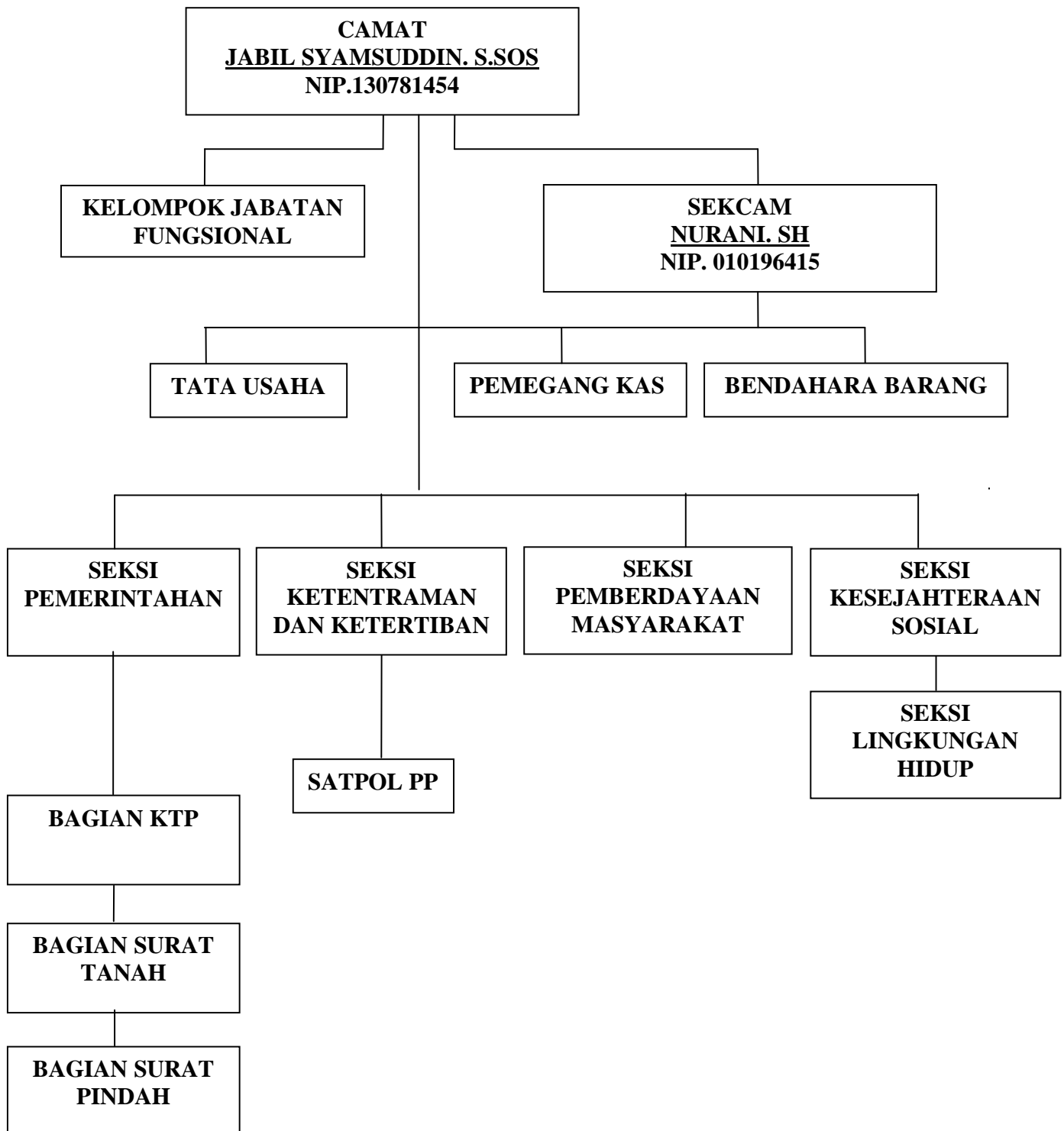
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Tanah Putih

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam Pasal 5 yang berbunyi “Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”.

Dari Undang-Undang diatas dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi aparat birokrasi Kantor Camat di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah keluar Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan Tanah Putih yaitu Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Tanah Putih. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel struktur organisasi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir di bawah ini :

Gambar IV.1

Struktur Organisasi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir



1. Camat

Tugas dan Fungsi Camat yaitu :

Camat mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya tersebut Camat mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan pelimpahan kewenang sebagai wewenang pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsinya yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Camat sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan politik dalam negeri.
- b. Pembinaan pemerintahan Kelurahan.
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi, distribusi dan pembinaan sosial.

2. Sekretaris Camat

Adapun Tugas – tugas Sekcam sebagai berikut :

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pengendalian serta evaluasi tertib administrasi perkantoran.
- b. Melaksanakan urusan administrasi Negara.
- c. Pengendalian surat-surat dan nota dinas.
- d. Pengendalian semua kepegawaian.
- e. Pengendalian urusan perlengkapan.
- f. Pengendalian urusan rumah tangga.
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Camat.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan pembangunan urusan Otonomi Daerah.
- b. Melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembinaan terhadap pemerintahan Kelurahan.
- c. Melaksanakan Adminisrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- d. Melaksanakan Administrasi Monografi dan peta Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Melaksanakan pembinaan sosial politik.
- f. Melaksanakan Administrasi dan penertiban Administrasi Pertanahan.

- g. Mengerjakan buku harian Camat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan-pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melaksanakan tugas-tugas Polisi Pamong Praja.
- c. Pembinaan dan penertiban tempat-tempat usaha dan domisili.
- d. Penertiban dan penegakan Perda / Kepala Wilayah.
- e. Melaksanakan pendataan dan penertiban usaha-usaha perdagangan dan industri.
- f. Melaksanakan operasi penertiban pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban.
- g. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat.
- h. Mengawasi atas aset-aset pemerintah.
- i. Pembinaan perlindungan masyarakat.
- j. Pembinaan tempat-tempat pariwisata.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan pembinaan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
- b. Pembinaan produksi dan distribusi usaha-usaha masyarakat.
- c. Merencanakan dan melaksanakan urusan lingkungan lingkungan hidup.
- d. Pembinaan perekonomian rakyat.

- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan umum.
- f. Merencanakan dan melaksanakan forum komunikasi pembangunan.
- g. Membina dan memotivasi fasilitas masyarakat dalam bidang pembangunan dan pelaksanaan K3.
- h. Pembinaan industri, perdagangan dan penanaman modal.
- i. Melaksanakan tugas-tugas bidang perhubungan.
- j. Pembinaan dan pemberdayaan FK-LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

6. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan bidang social, kependudukan, peranan wanita dan olahraga.
- b. Melaksanakan pembinaan kehidupan beragama.
- c. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat.
- d. Membina organisasi-organisasi kepemudaan dan wanita.
- e. Membina dharma wanita, PKK dan Majelis Taklim.
- f. Melaksanakan urusan ketenaga kerjaan.
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Keluarga Berencana (KB).
- h. Melaksanakan urusan penanggulangan anak nakal, korban narkoba, WTS, waria dan gelandangan.
- i. Melaksanakan urusan penanggulangan bencana alam.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada penelitian banyaknya responden yang diambil sebagai sampel berjumlah 30 orang, yaitu camat dan seluruh pegawai yang bekerja di instansi kantor Kecamatan Tanah Putih dan Lurah atau Kepala Desa. Adapun karakteristik dari responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel V.1. : Distribusi Responden Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18-22 tahun	2	6,67
2.	23-27 tahun	15	50,00
3.	28-32 tahun	7	23,33
4.	33-37 tahun	3	10,00
5.	38-43 tahun	3	10,00
6.	43-47 tahun	-	-
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden yang berumur antara 23-27 tahun lebih banyak jumlahnya yaitu 15 orang (50,00 %), yang berumur 28-32 tahun berjumlah 7 orang (23,33 %), yang berumur 33-37 tahun berjumlah 3 orang

(10,00%), yang berumur 38-43 tahun berjumlah 3 orang (10,00 %), yang berumur 18-22 tahun berjumlah 2 orang (6,67 %).

Tabel V.2. : Distribusi Responden Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SLTA	22	73,33
2	Diploma	3	10,00
3	Sarjana	5	16,67
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari 30 responden berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 22 orang (73,33%), dan yang berpendidikan Diploma sebanyak 3 orang (10,00 %), dan yang berpendidikan Sarjana sebanyak 5 orang (16,67%).

Tabel V.3. : Distribusi responden pegawai pada kantor camat tanah putih Kabupaten Rokan Hilir.

NO	Klasifikasi lama bekerja (Tahun)	Jmlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Dibawah 1	4	13,33
2.	1 - 5	17	56,67
3	Diatas 5	9	30,00
		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa lamanya pegawai yang bekerja di kantor camat tersebut sudah cukup memadai terhadap pengalaman, dimana lebih banyak pegawai yang berpengalaman sehingga pegawai dalam bekerja sudah cukup menguasai bidang pekerjaannya, tetapi biasanya jika pegawai telah mempunyai pengalaman yang cukup maka pegawai tersebut akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya karena ia mengetahui betul tentang pekerjaannya.

B. Koordinasi Camat Dengan Lurah/Kepala Desa dan Pihak Terkait
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1)

Pada variabel koordinasi camat dengan lurah / kepala desa dan pihak terkait dalam kuisioner ini diwakili oleh tujuh buah pertanyaan yang mencerminkan indikator koordinasi camat dengan pihak terkait. Untuk jelasnya hasil penelitian terhadap indikator – indikator tersebut dapat dilihat pada penjelasan dan tabel – tabel berikut :

Tabel V.4. : Distribusi Jawaban Responden Tentang Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

No	Kategori	PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1)	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	8	26,66
2	Kadang-kadang	17	56,67
3	Kurang Baik	5	16,67
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat sebagian responden bahwa 17 orang (56,667 %) menyatakan kadang-kadang terhadap pemberdayaan masyarakat yang dikoordinir langsung oleh pihak kecamatan. Sedangkan responden yang menyatakan terlaksananya pemberdayaan masyarakat dikoordinir pihak kecamatan sangat baik sebanyak 8 orang (26,66 %). Sementara itu, responden yang menyatakan kurang baik adalah 5 orang (16,67 %).

Menurut responden, kurang baiknya koordinasi pemberdayaan masyarakat tersebut diakibatkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi dari aparat kecamatan tentang implementasi dari program tersebut.

Tabel V.5. : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi yang dilakukan Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

No	Kategori	PP.Nomor19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat(1)	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tepat	18	60,00
2	Kadang-kadang	7	23,33
3	Kurang Tepat	5	16,67
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 18 orang (60,00 %) responden menyatakan sangat tepat tentang upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan responden yang menyatakan kadang-kadang mengenai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 7 orang (23,33 %).

Sementara itu, responden yang menyatakan kurang tepat adalah 5 orang (16,667 %). Hal ini sesuai dengan tabel V.5. dapat disimpulkan bahwa kondisi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Tabel V.6. : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

No	Kategori	PP.Nomor19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat(1)	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	14	46,67
2	Kadang-kadang	10	33,33
3	Kurang Baik	6	20,00
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel dapat diketahui sebagian responden bahwa 14 orang (46,67 %) menyatakan sangat baik tentang koordinasi camat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan responden yang menyatakan kadang - kadang tentang koordinasi camat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebanyak 10 orang (33,33 %). Sementara itu, responden yang menyatakan kurang baik tentang koordinasi camat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 orang (20,00 %).

Tabel V.7. : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

No	Kategori	PP.Nomor19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat(1)	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	20,00
2	Kadang-kadang	16	53,33

3	Kurang Baik	8	26,67
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Tabel di atas menjelaskan bahwa 16 orang (53,33 %) responden menyatakan kadang-kadang dalam hal koordinasi camat dalam upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik dalam hal koordinasi camat dalam upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebanyak 8 orang (26,67 %). Sementara itu, responden yang menyatakan sangat baik dalam hal koordinasi camat dalam upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum adalah 6 orang (20,00%).

Tabel V.8. : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

No	Kategori	PP.Nomor19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat(1)	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	7	23,33
2	Kadang-kadang	18	60,00
3	Kurang Baik	5	16,67
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden bahwa 18 orang (60,00 %) menyatakan kadang-kadang tentang koordinasi camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sedangkan sebanyak 7 orang (23,33%) responden menyatakan sangat baik tentang koordinasi camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan sebanyak 5 orang (16,67 %)

responden menyatakan kurang baik tentang koordinasi camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel V.9. : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

No	Kategori	PP.Nomor19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat(1)	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	11	36,67
2	Kadang-kadang	15	50,00
3	Kurang Baik	4	13,33
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 orang (50,00 %) responden menyatakan kadang-kadang tentang koordinasi camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Sedangkan responden yang menyatakan sangat baik tentang koordinasi camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan adalah sebanyak 11 orang (36,67 %). Sementara itu, responden yang menyatakan kurang baik tentang koordinasi camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebanyak 4 orang (13,33 %).

Tabel V.10. : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sudah berjalan dengan baik dan tepat.

No	Kategori	PP.Nomor19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat(1)	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tepat	5	16,67
2	Kadang-Kadang	21	70,00
3	Kurang Tepat	4	13,33
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden bahwa 21 orang (70,00 %) menyatakan kadang-kadang koordinasi camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan berjalan dengan baik dan tepat. Sedangkan responden yang menjawab sangat tepat tentang koordinasi camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau keelurahan adalah sebanyak 5 orang (16,67 %). Sementara itu, responden yang menjawab kurang tepat tentang koordinasi camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebanyak 4 orang (14,3 %).

Tabel V.11. : Rekapitulasi Koordinasi Camat Dengan Lurah/Kepala Desa dan Pihak Terkait Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1)

No	Koordinasi Camat dengan pihak terkait (PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1))	Tanggapan Responden (%)		
		Sangat Baik	Kadang-Kadang	Kurang Baik
1	Pemberdayaan Masyarakat	26,66	56,67	16,67
2	Penyelenggaraan TranTib	60,00	23,33	16,67
3	Penegakan Peraturan Perundangan	46,67	33,33	20,00
4	Pemiliharaan Fasilitas Umum	20,00	53,33	26,67
5	PelaksanaanKegiatan	23,33	60,00	16,67
6	Pemerintahan	36,67	50,00	13,33
7	Membina Kegiatan Pemerintahan	16,67	70,00	13,33
	Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat			
Jumlah Rata - Rata		32,85	49,52	17,62

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

C. Perencanaan Pembangunan

Tabel V.12. : Distribusi Jawaban Responden Tentang fungsi perencanaan yang dijalankan oleh camat dalam menyusun dan menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pegawai/bawahannya.

No	Kategori	Perencanaan Pembangunan	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	16	53,33
2	Kurang Baik	9	30,00
3	Tidak Baik	5	16,67
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Tabel di atas menjelaskan bahwa 16 orang (53,33 %) menyatakan baik tentang fungsi perencanaan dalam menyusun dan menetapkan program kerja. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik tentang fungsi perencanaan dalam menyusun dan menetapkan program kerja adalah sebanyak 9 orang (30,00 %). Sementara itu, responden yang menyatakan tidak baik tentang fungsi perencanaan dalam menyusun dan menetapkan program kerja yang dilaksanakan oleh pegawai atau bawahannya sebanyak 5 orang (14,3 %).

Tabel V.13. : Distribusi Jawaban Responden Tentang camat selaku koordinator dalam melakukan tugas umum pemerintahan telah adanya perencanaan.

No	Kategori	Perencanaan Pembangunan	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	16	53,33
2	Kadang-kadang	11	36,67
3	Belum	3	10,00
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menyatakan sudah adanya perencanaan dengan camat selaku koordinator dalam melakukan tugas umum pemerintahan adalah sebanyak 16 orang (53,33%). Sedangkan responden yang menyatakan kadang-kadang adanya perencanaan dengan camat selaku koordinator dalam melakukan tugas umum pemerintahan sebanyak 11 orang (36,67 %) dan belum adanya perencanaan dengan camat selaku koordinator sebanyak 3 orang (10,00 %).

Tabel V.14. : Distribusi Jawaban Responden Tentang Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh camat terhadap bawahan dalam memantau, memonitor kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.

No	Kategori	Perencanaan Pembangunan	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	9	30,00
2	Kurang Baik	15	50,00
3	Tidak Baik	6	20,00
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kurang baiknya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh camat dalam hal memantau dan memonitoring program sebanyak 15 orang (50,00 %). Sedangkan responden yang menyatakan baiknya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh camat dalam hal memantau dan memonitoring program adalah sebanyak 9 orang (30,00 %) dan responden yang menyatakan tidak baiknya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh camat dalam hal memantau dan memonitoring program adalah sebanyak 6 orang (20%).

Tabel V.15. : Rekapitulasi Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan.

No	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan	Tanggapan Responden (%)		
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Fungsi Perencanaan	53,33	30,00	16,67
2	Koordinator dalam Tugas Umum Pemerintahan	53,33	36,67	10,00
3	Fungsi Pengawasan	30,00	50,00	20,00
Jumlah Rata - Rata		45,55	38,89	15,55

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

D. Koordinasi dan Komunikasi

Tabel V.16. : Distribusi Jawaban Responden Tentang Hubungan antara pimpinan dengan pegawai pada kantor camat.

No	Kategori	Koordinasi dan Komunikasi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	19	63,33
2	Kurang baik	11	36,67
3	Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 19 responden (63,33%) menyatakan baik hubungan antara pimpinan dengan pegawai pada kantor camat. Sedangkan 11 responden (36,67%) menyatakan kurang baik. Sementara itu responden yang menyatakan tidak baik hubungan antara pimpinan dengan pegawai di kantor camat sebanyak 0 orang (0 %).berarti hubungan antara camat dengan pegawainya dinyatakan.

Tabel V.17. : Distribusi Jawaban Responden Tentang Tugas Umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Camat telah berjalan dengan baik.

No	Kategori	Koordinasi dan Komunikasi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	8	26,67
2	Kurang Baik	18	60,00
3	Tidak Baik	4	13,33
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 18 orang (60,00%) menjawab kurang baik pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh camat, sebanyak 8 orang (26,67%) menyatakan baik pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh camat, dan 4 orang (13,33%) menyatakan tidak baik pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

Tabel V.18. : Distribusi Jawaban Responden Tentang Camat ada melakukan pembagian tugas.

No	Kategori	Koordinasi dan Komunikasi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	19	63,33
2	Sekali-kali	8	26,67
3	Tidak ada	3	10,00
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari table di atas dapat diketahui sebanyak 19 orang (63,33%) ada melakukan pembagian tugas, sebanyak 8 orang (26,67%) menyatakan sekali-kali ada tentang pembagian tugas, dan 3 orang (10,00%) menyatakan tidak ada tentang pembagian tugas di instansi Kecamatan.

Tabel V.19. : Distribusi Jawaban Responden Tentang semua pembagian tugas dan hubungan kerja tersebut dapat berjalan dengan baik.

No	Kategori	Koordinasi dan Komunikasi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	18	60,00
2	Kurang baik	9	30,00
3	Tidak baik	3	10,00
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik tentang pembagian tugas dan hubungan kerja. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden sebanyak 18 orang (60,00%) menyatakan kurang baik tentang pembagian tugas dan hubungan kerja adalah sebanyak 9 orang (30,00). Sedangkan 3 orang (10%) menyatakan tidak baik tentang pembagian tugas dan hubungan kerja.

Tabel V.20. : Rekapitulasi Koordinasi dan Komunikasi

No	Koordinasi dan Komunikasi	Tanggapan Responden (%)		
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Hubungan Pimpinan Bawahan	63,33	36,67	0
2	Tugas Umum Pemerintahan	26,67	60,00	13,33
3	Pembagian Tugas	63,33	26,67	10,00
4	Hubungan Kerja	60,00	30,00	10,00
Jumlah Rata - Rata		53,33	38,33	8,33

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009.

Tabel V.21. : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan (Studi Kasus Tentang Fungsi Koordinasi Camat)di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

No	Variabel	Tanggapan Responden (%)		
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Peraturan Pemerintah. No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1)	32,85	49,52	17,62
2	Perencanaan Pembangunan	45,55	38,89	15,55
3	Koordinasi dan Komunikasi	53,33	38,33	8,33
Jumlah Rata - Rata		43,91	42,24	13,83

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2009.

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan (Studi Tentang Fungsi Koordinasi Camat)di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.dapat dikategorikan cukup baik karena dari 31 orang responden, maka yang menyatakan baik ada sebanyak 43,91% dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 42,24% serta yang menyatakan tidak baik adalah sebanyak 13,83%. maka sesuai dengan hasil akhir ini dinyatakan baik.

Dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian dengan maksud dapat menjawab dari permasalahan penelitian dan tidak menyimpang dari kerangka teori. Hal ini berarti Analisis Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan

Studi Kasus Tentang Fungsi Koordinasi Camat berjalan dengan baik dapat memberikan kepuasan kepada Instansi yang terkait maupun di kelurahan atau/dan Desa di setiap kecamatan khususnya dikantornya sendiri di Kecamatan Tanah Putih.

Fungsi koordinasi berfungsi supaya dalam rangkaian kerja yang dilakukan berurutan atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat tercapai tujuan yang diinginkan. fungsi koordinasi merupakan item yang sangat penting dalam birokrasi pemerintahan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan kepuasan dan hasil yang baik

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009, dapat diketahui pelaksanaan tugas umum pemerintahan studi tentang fungsi koordinasi camat yang sesuai dengan aturan yang dilaksanakan secara maksimal dapat memberikan kepuasan terhadap yang berkaitan. Pada kenyataan di lapangan sebagaimana jawaban dari responden mengatakan bahwa koordinasi camat di kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah kurang baik walaupun pada hasil akhirnya tetap pada tataran baik ini dikarenakan dari hasil penelitian ini hasil penelitian yang menyatakan baik rata – rata (43,91%) dan kurang baik (42,24%) yang mana selisih dari hasil tersebut tidak memiliki signifikan..Dalam meningkatkan fungsi koordinasi ini, aparat pemerintah Kecamatan dibantu oleh lurah dan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK dan Karang Taruna hendaknya dapat . mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan,

pembinaan dan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Hasil dari wawancara dengan Camat Tanah Putih fungsi koordinasi ini dengan pihak pegawai, koramil, kapolsek, Lurah/Kades baik itu dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Perundangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah, hal ini dilakukan supaya pihak yang berkaitan bisa memahami dan mengerti tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat. Dengan mengertinya setiap yang berkaitan tersebut menjadi kekuatan bagi Pemerintah kecamatan dalam pencapaian tujuan yang di inginkan.

Hasil dari wawancara dengan Camat Tanah Putih menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, sehingga koordinasi yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada pihak yang berkaitan. Dengan realitas ini akan menjadi kekuatan bagi Pemerintahan Kecamatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas maka dapat diketahui bahwa Analisis Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan (Studi Kasus Tentang Fungsi Koordinasi Camat) di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.dapat dikategorikan cukup baik karena dari 31 orang responden, maka yang menyatakan baik ada sebanyak 43,91% dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 42,24% serta yang menyatakan tidak baik adalah sebanyak 13,83%. maka sesuai dengan hasil akhir ini dinyatakan baik.

2. Dari hasil pengamatan penulis terlihat tidak biasanya pemerintahan desa untuk menjalankan rencana yang telah diberikan oleh pihak kecamatan yang disebabkan tidak tersedianya dana pendukung bagi pelaksanaan rencana yang diberikan camat tersebut. Pelaksanaan komunikasi hubungan antara pimpinan dengan pegawai pada kantor camat, tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh Camat, pembagian tugas serta hubungan kerja dapat terlaksana dengan baik, tetapi itu semua juga mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi ini karena wilayah kecamatan Tanah Putih sangat luas dan letak satu desa dengan desa yang lain saling berjauhan.

B. Saran

1. Sebaiknya camat dalam pelaksanaan koordinasi yang dilihat dari perencanaan dapat lebih baik, dan bisa membuat suatu program yang jelas baik itu secara tertulis maupun secara lisan.
2. Hendaknya camat sehubungan dengan tugas umum pemerintahan lebih mempererat lagi hubungan komunikasi dan memenuhi criteria yang ada.. dan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan camat itu sebaiknya memperjelas lagi pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan dengan dokumen tertulis
3. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan camat itu sebaiknya dilakukan dengan adanya pertemuan dan pengawasan dari atasan sehingga para pelaksana tugas lebih merasa dihargai dan diperhatikan, selain itu kemampuan dan kualitas bawahan bisa ditingkatkan sehingga pimppinan dapat mengetahui masalah-masalah yang ada diwilayah kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, 2002
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Buku Monografi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007.
- Gie Liang The, *Pertumbuhan Pemerintan daerah di Negara republic Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1994.
- Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta 1985.
- Handoko, Hani. T, *Manajemen Edisi II*, BPFE, Jogjakarta 1984
- Kartono Kartini , *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kuswata. R. Agusthoha, *Manajemen Pembangunan kecamatan*, Grafindo Utama, Jakarta, 1985.
- Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Ndraha Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Salam, Setyawan, Dharma, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Siagian P. Sondang, *Administrasi, Manajemen dan Prilaku Organisasi* CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1994.
- Singanimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Sufian, *Organisasi, Manajemen dan Aplikasi*, UIR Press, Pekanbaru, 1995.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2003
- Surianingrat, Bayu, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Syafiie, Inu, Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2001

Syamsi, Ibnu, *Sistem Dan Prosedur Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994

....., *Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Widjaja. H.AW. Prof. Drs, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Widjaja. H.AW. Prof. Drs, *Pemerintah Desa*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Peraturan Dan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 *Tentang Kecamatan*

Peraturan Daerah Rokan Hilar Nomor 14 Tahun 2007 *Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang Camat.*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Tanah Putih

Lampiran 2 : Kuisioner Penelitian

Lampiran 3 : Surat Permohonan Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 4 : Surat izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Riset dari Badan INFOKOM PROP. RIAU

Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Riset dari Kesbang,Linmas Kab.Rokan Hilir

Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset dari Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Lampiran 8 : Surat Bimbingan Skripsi dari Pihak Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel III 1 : Jumlah Populasi dan Sampel	39
Table IV 1 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	44
Table IV.2 : Sarana Pendidikan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	45
Table IV.3 : Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	47
Tabel IV.4: Sarana Ibadah di Kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir	48
Tabel V.1 : Distribusi Responden Menurut Umur	55
Tabel V.2 : Distribusi Responden Menurut Pendidikan	56
Tabel V.3 : Distribusi responden pegawai pada kantor camat tanah putih kabupaten rokan hilir	56
Tabel V.4 : Distribusi Jawaban Responden Tentang Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	57
Tabel V.5 : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi yang dilakukan camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	58
Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	59
Tabel V.7 : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	59
Tabel.V.8 : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	60
Tabel.V.9 : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	61
Tabel.V.10 : Distribusi Jawaban Responden Tentang koordinasi camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	61
Tabel.V.11 : Rekapitulasi Koordinasi Camat Dengan Lurah/Kepala Desa dan Pihak Terkait Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1).....	62

Tabel.V.12 :	Distribusi Jawaban Responden Tentang fungsi perencanaan yang dijalankan oleh camat dalam menyusun dan menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pegawai/bawahannya	63
Tabel V.13 :	Distribusi Jawaban Responden Tentang camat selaku koordinator dalam melakukan tugas umum pemerintahan telah adanya perencanaan.....	63
Tabel V.14 :	Distribusi Jawaban Responden Tentang Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh camat terhadap bawahan dalam memantau, memonitor kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.....	65
Tabel V.15 :	Rekapitulasi Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan	
Tabel V.16 :	Distribusi Jawaban Responden Tentang Hubungan antara pimpinan dengan pegawai pada kantor camat	65
Tabel V.17 :	Distribusi Jawaban Responden Tentang Tugas Umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Camat	66
Tabel V.18 :	Distribusi Jawaban Responden Tentang Camat melakukan pembagian tugas.....	66
Tabel V.19 :	Distribusi Jawaban Responden Tentang semua pembagian tugas dan hubungan kerja tersebut dapat berjalan dengan baik.....	67
Tabel V.20 :	Rekapitulasi Koordinasi dan Komunikasi	67
Tabel V.21 :	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan (Studi Tentang Fungsi Koordinasi Camat)di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	68

DAFTAR PERTANYAAN (QUESTIONER)

“ ANALISIS KOORDINASI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (STUDI KASUS TENTANG FUNGSI KOORDINASI CAMAT) DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”

Kepada Yth,

Bapak/Ibu

Di,

Kecamatan Tanah Putih

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam menunjang pelaksanaan penelitian, maka saya mengajukan permohonan bantuan kerjasama untuk dapat kiranya BApak/Ibu mengisi sejumlah angket dan memberikan sejumlah penjelasan atas pertanyaan yang dimaksud untuk tujuan sebagai dasar analisis dalam penulisan lapporan penelitian (skripsi).

Adapun permasalahan yang hendak di paparkan pada laporan penelitian dalam bentuk skripsi adalah “ Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan (Studi Tentang Fungsi Koordinasi Camat)Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir” dan selanjutnya skripsi ini hanya dikomsumsi untuk kalangan akademis dan tidak diedarkan pada masyarakat banyak. untuk saya berharap bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu sekalian. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

1. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i untuk pilihan jawaban a, b, c.
2. Untuk pertanyaan yang memerlukan tulisan/alasan, isilah diatas titik yang tersedia.

2. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor Respoden :
2. Nama
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan / Bagian :
5. Lama Bekerja :
6. Pendidikan Terakhir :

3. Daftar Pertanyaan

A. Koordinasi Camat Dengan Lurah/Kepala Desa dan Pihak Terkait

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1)

1. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I Apakah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan kepada camat berjalan dengan semestinya?
 - a. Sangat Baik
 - b. Kadang-kadang
 - c. Kurang Baik
2. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I Apakah koordinasi yang dilakukan camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah tepat sasaran?
 - a Sangat Tepat
 - b. Kadang-Kadang
 - c. Kurang Tepat

3. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I Apakah koordinasi camat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sudah berjalan sebagai mestinya?
 - a.Sangat Baik
 - b.Kadang-kadang
 - c.Kurang Baik
4. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I Apakah koordinasi camat dalam upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum berjalan dengan baik?
 - a.Sangat Baik
 - d.Kadang-kadang
 - c.Kurang Baik
5. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I Apakah koordinasi camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sudah berjalan dengan baik?
 - a.Sangat Baik
 - b.Kadang-kadang
 - c.Kurang Baik
6. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I Apakah koordinasi camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan berjalan dengan baik?
 - a.Sangat Baik
 - b.Kadang-kadang
 - c.Kurang Baik
7. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I Apakah koordinasi camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sudah berjalan dengan baik dan tepat?
 - a.Sangat Tepat
 - b. Kadang-Kadang
 - c.Kurang Tepat

B. Perencanaan Pembangunan

1. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I, apakah fungsi perencanaan yang dijalankan oleh camat dalam menyusun dan menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pegawai/bawahannya?
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
2. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I, Apakah camat selaku koordinator dalam melakukan tugas umum pemerintahan telah adanya perencanaan?
 - a. Sudah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Belum
3. Bagaimana menurut bapak/Ibu, Saudara/I, Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh camat terhadap bawahan dalam memantau, memonitor kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya?
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik

C. Koordinasi dan Komunikasi

1. Bagaimana menurut bapak/Ibu, Saudara/I, Hubungan antara pimpinan dengan pegawai pada kantor Camat ini ?
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
2. Apakah menurut bapak/Ibu, Saudara/I, Tugas Umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Camat telah berjalan dengan baik ?
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik

3. Menurut bapak/Ibu, Saudara/I, Apakah Camat ada melakukan pembagian tugas ?
 - a. Ada
 - b. Sekali-kali
 - c. Tidak Ada
4. Bagaimana menurut bapak/Ibu, Saudara/I, Apakah semua pembagian tugas dan hubungan kerja tersebut dapat berjalan dengan baik?
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik